

BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM, JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa besaran honorarium, Jasa Narasumber /Tenaga Ahli dan pengganti transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016; 2. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL. |
|  |  | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah orang pribadi / pegawai yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 11. Tim Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja pemerintah daerah. 12. Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum adalah Tim yang melakukan harmonisasi terhadap produk-produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah. 13. Tim Penyelesaian Kasus Hukum adalah Tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melakukan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana teknis yang melayani pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan sistem dan *domain e-procurement*. 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PNS pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya. 18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. 19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. 20. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. 21. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. 22. Jasa nara sumber / tenaga ahli adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada PNS/Non PNS atas peran dan tanggungjawabnya sebagai nara sumber / tenaga ahli. 23. Pengganti transport adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. |
|  |  | BAB II  JENIS HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT  Pasal 2   1. Jenis honorarium terdiri dari : 2. honorarium panitia pelaksana kegiatan; 3. honorarium panitia / tim; 4. honorarium TAPD; 5. honorarium Tim RKPD; 6. honorarium Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum; 7. honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum; 8. honorarium PPK; 9. honorarium ULP/ Pejabat Pengadaan dan/atau penerima hasil pekerjaan; 10. honorarium LPSE; dan 11. honorarium PPTK. 12. Jenis jasa nara sumber/tenaga ahli adalah jasa bagi PNS/Non PNS yang ditunjuk atas peran dan tanggungjawabnya sebagai nara sumber / tenaga ahli; 13. Jenis pengganti transport adalah peran Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.   Pasal 3   * + - 1. Honorarium diberikan kepada :   1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam suatu program dan kegiatan;   2. Honorarium Panitia/tim merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam kepanitiaan/tim;  1. Honorarium TAPD merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam TAPD; 2. Honorarium Tim RKPD merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; 3. Honorarium Tim Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS / Non PNS yang terlibat langsung dalam penyusunan produk hukum; 4. Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukum merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus hukum; 5. Honorarium PPK merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen keterlibatannya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah; 6. Honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau Penerima Hasil Pekerjaan adalah honorarium yang diberikan kepada PNS karena keterlibatannya didalam ULP / Pejabat Pengadaan dan / atau penerima hasil pekerjaan; 7. Honorarium LPSE adalah honorarium yang diberikan kepada PNS karena keterlibatannya didalam LPSE; 8. Honorarium PPTK merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai PPTK.    * + 1. Jasa nara sumber/tenaga ahli diberikan kepada PNS/Non PNS karena memiliki pengetahuan dan keahlian khusus di bidangnya sehingga dapat ditunjuk sebagai nara sumber / tenaga ahli.        2. Pengganti Transport dapat diberikan kepada Non PNS atas undangan menghadiri acara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah. |
|  |  | BAB III  BESARAN HONORARIUM, JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT.  Pasal 4  Besaran Honorarium, Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  Pasal 5  Besaran honorarium dan satuan biaya bagi pekerjaan/kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tidak tercantum dalam Peraturan ini, menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.  Pasal 6  PNS dan non PNS hanya berhak menerima honorarium bulanan dalam satu tahun maksimal 12 (dua belas) kali dari setiap Perangakat Daerah.  Pasal 7  Apabila Kepala Perangkat Daerah melimpahkan tugasnya kepada staf bawahannya maka segala hak dibayarkan kepada yang mewakilinya.  BAB IV  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 8  Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli dan Pengganti Transport Bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 9  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Tabanan |
| pada tanggal 2 Januari 2018 |
| BUPATI TABANAN, |
|  |
| NI PUTU EKA WIRYASTUTI |

T.T.

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

###### I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM, JASA NARA SUMBER/TENAGA AHLI DAN PENGGANTI TRANSPORT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1). Besaran Honorarium sebagai berikut :   1. Besaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Panitia/Tim :    * + - 1. bagi PNS / Non PNS disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut\_:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JABATAN | NILAI KEGIATAN  (dalam jutaan rupiah) | | | | 0 s/d 100 | Di atas 100 s/d 200 | Di atas 200 | | Penanggung Jawab / Penasihat | 375.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 | | Pengarah/ Pembina | 350.000,00 | 375.000,00 | 400.000,00 | | Ketua Pelaksana / PPTK | 325.000,00 | 350.000,00 | 375.000,00 | | Wakil Ketua Pelaksana | 315.000,00 | 340.000,00 | 360.000,00 | | Sekretaris | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | | Wakil Sekretaris | 275.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | | Anggota | 260.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 | | Pelaksana Teknis | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | | Pelaksana Administrasi | 230.000,00 | 260.000,00 | 280.000,00 |  * + - * 1. Bagi PNS / Non PNS yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki beban dan tanggungjawab tinggi, seperti:   penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;  penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;  penyusunan dan Pembahasan RAPBD dan RAPBD Perubahan.  dapat diberikan Honorarium Panitia/Tim disesuaikan dengan besaran nilai kegiatan setiap bulan setinggi – tingginya sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JABATAN | NILAI KEGIATAN  (dalam jutaan rupiah) | | | | 0 s/d 50 | Di atas  50 s/d 100 | Di atas 100 | | Penanggung Jawab / Penasihat | 650.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | | Pengarah/ Pembina | 600.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | | Ketua | 550.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 | | Wakil Ketua | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | | Sekretaris | 450.000,00 | 550.000,00 | 650.000,00 | | Wakil Sekretaris | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | | Anggota/Koordinator | 375.000,00 | 475.000,00 | 575.000,00 | | Pelaksana Teknis | 350.000,00 | 425.000,00 | 525.000,00 | | Pelaksana Administrasi | 325.000,00 | 375.000,00 | 475.000,00 |  1. Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Penanggung Jawab /Penasihat | : | Rp.7.500.000,00/Bulan | | 2) | Pengarah/ Pembina | : | Rp.7.000.000,00/Bulan | | 3) | Ketua | : | Rp.6.500.000,00/Bulan | | 4) | Wakil Ketua | : | Rp.5.500.000,00/Bulan | | 5) | Sekretaris | : | Rp.5.000.000,00/Bulan | | 6) | Wakil Sekretaris | : | Rp.4.500.000,00/Bulan | | 7) | Anggota/Koordinator | : | Rp.2.000.000,00/Bulan | | 8) | Pelaksana Teknis | : | Rp.1.000.000,00/Bulan | | 9) | Pelaksana Administrasi | : | Rp. 700.000,00/Bulan |  1. Besaran Honorarium Tim RKPD bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Penasehat | : | Rp.2.500.000,00/Bulan | | 2) | Penanggungjawab | : | Rp.2.250.000,00/Bulan | | 3) | Ketua | : | Rp.2.000.000,00/Bulan | | 4) | Wakil Ketua | : | Rp.1.800.000,00/Bulan | | 5) | Sekretaris | : | Rp.1.600.000,00/Bulan | | 6) | Wakil Sekretaris | : | Rp.1.400.000,00/Bulan | | 7) | Koordinator | : | Rp.1.200.000,00/Bulan | | 8) | Anggota | : | Rp.1.100.000,00/Bulan | | 9) | Pelaksana Teknis | : | Rp.1.000.000,00/Bulan | | 10) | Pelaksana Administrasi | : | Rp. 800.000,00/Bulan |  1. Besaran Honorarium Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Ranperda, Ranperbup dan Produk Hukum lainnya bagi PNS / Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Penasehat | : | Rp.4.000.000,00/Bulan | | 2) | Wakil Penasehat | : | Rp.3.500.000,00/Bulan | | 3) | Ketua | : | Rp.3.000.000,00/Bulan | | 4) | Wakil Ketua | : | Rp.2.700.000,00/Bulan | | 5) | Sekretaris | : | Rp.2.500.000,00/Bulan | | 6) | Wakil Sekretaris | : | Rp.1.200.000,00/Bulan | | 7) | Pelaksana Teknis | : | Rp. 800.000,00/Bulan | | 8) | Anggota | : | Rp. 500.000,00/Bulan | | 9) | Pelaksana Administrasi | : | Rp. 375.000,00/Bulan |  1. Besaran Honorarium Tim Penyelesaian Kasus Hukumbagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Ketua | : | Rp.2.000.000,00/Bulan | | 2) | Wakil Ketua | : | Rp.2.000.000,00/Bulan | | 3) | Sekretaris | : | Rp.1.500.000,00/Bulan | | 4) | Anggota | : | Rp.1.500.000,00/Bulan | | 5) | Pelaksana Teknis | : | Rp. 500.000,00/Bulan |  1. Besaran Honorarium PPK setinggi-tingginya Rp.750.000,00/Bulan. 2. Besaran Honorarium ULP / Pejabat Pengadaan dan/atau Penerima Hasil Pekerjaan bagi PNS setinggi-tingginya sebagai berikut: 3. ULP sebesar :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | a) | Kepala ULP | : | Rp.2.300.000,00/Bulan | | b) | Sekretaris ULP | : | Rp.2.000.000,00/Bulan | | c) | Kepala Bidang | : | Rp.1.600.000,00/Bulan | | d) | Staf Pendukung Bidang | : | Rp. 900.000,00/Bulan | | e) | Ketua Pokja | : | Rp.1.900.000,00/Bulan | | f) | Sekretaris Pokja | : | Rp.1.850.000,00/Bulan | | g) | Anggota Pokja | : | Rp.1.800.000,00/Bulan |  1. Pejabat Pengadaan sebesar Rp. 1.000.000,00 / Bulan. 2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebesar :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | a) | Ketua | : | Rp. 700.000,00/Bulan | | b) | Sekretaris | : | Rp. 600.000,00/Bulan | | c) | Anggota Tim | : | Rp. 500.000,00/Bulan |  1. Besaran honorarium LPSE setinggi-tingginya sebagai berikut:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Penanggung Jawab | : | Rp.1.500.000,00/Bulan | | 2) | Pengarah | : | Rp.1.250.000,00/Bulan | | 3) | Ketua | : | Rp.1.000.000,00/Bulan | | 4) | Sekretaris | : | Rp. 800.000,00/Bulan | | 5) | Anggota | : | Rp. 750.000,00/Bulan | | 6) | Pelaksana Administrasi | : | Rp. 500.000,00/Bulan |  1. Bagi PNS yang ditunjuk sebagai PPTK dapat diberikan honorarium setinggi-tingginya Besaran Rp.500.000,00/Bulan.   (2). Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli bagi PNS dan Non PNS setinggi-tingginya sebagai berikut :   1. Jasa Nara Sumber / Tenaga ahli yang berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan golongan sebagai berikut :  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1) | Golongan IV | : | Rp. 500.000,00/Jam | | 2) | Golongan III | : | Rp. 400.000,00/Jam | | 3) | Golongan II | : | Rp. 300.000,00/Jam |  1. Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli yang berstatus PNS di luar Pemerintah Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur pada intansi yang bersangkutan dan/atau besarannya sebagaimana dimaksud pada huruf.a.   (3).1Besaran pengganti transport bagi Non PNS atas undangan menghadiriacara tertentu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dapat diberikan uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 perhari. |
|  |

BUPATI TABANAN,

T.T.D.

NI PUTU EKA WIRYASTUTI